



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juli 2018, memberikan kuasa kepada: XXXXXX S, S.H pada Law Office XXXXXX S, S.H & Partners, berkantor di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mantan Anggota Polri Polda Riau, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 23 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 24 Juli 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr;tgl 28-11-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum, sebagaimana Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Nomor : XXXXXXXX, tanggal 7 Desember 1997.
2. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berumur 20 tahun.
3. Bahwa pada awal pernikahan hingga tahun 2001 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Delima, Gg. Arbai, Blok X, No. 06, RT. 07, RW. 06, Kel. Tobek Gadang, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah yang beralamat di Jl. 17, RT. 01, RW. 01, Kel. Air Putih, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.
5. Bahwa pada awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan tentram karena segala kewajiban Suami Istri antara Penggugat dan Tergugat dijalankan dengan baik.
6. Bahwa kemudian pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar, yang pada puncaknya Tergugat keluar rumah meninggalkan Tergugat dari Tempat Tinggal bersama Terakhir pada tahun 2003, yang disebabkan oleh, sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak, semenjak Penggugat bekerja sebagai Honor di POLDA RIAU.
  - b. Bahwa Tergugat sering bermain atau selingkuh dengan perempuan lain.
  - c. Bahwa Tergugat sering membohongi Penggugat dengan alasan pergi ke luar kota ternyata Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain.
  - d. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar, cacian dan makian kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran.

Halaman 2 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr;tgl 28-11-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat orangnya Tempramen, keras kepala, mau menang sendiri dan tidak mau mendengarkan kata-kata orang lain.
- f. Bahwa Tergugat beberapa kali pernah memukul Penggugat karena terjadi perkelahian sehingga Penggugat mengalami bengkok dan Lebam.
7. Bahwa sejak Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama pada tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
8. Bahwa sejak Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama pada tahun 2003 di Jl. Garuda Sakti, Gg. Villa Sentosa 17, RT. 01, RW. 01, Kel. Air Putih, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, hingga saat ini keberadaan atau tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi.
9. Bahwa saat ini Penggugat sudah bertempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas.
10. Bahwa dengan demikian, sudah tidak mungkin bagi Penggugat dan Tergugat menjalin rumah tangga lagi, Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat jelaskan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana aturan hukum
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr.tgl 28-11-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 7 Desember 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama SAKSI I.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;

Halaman 4 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr;tgl 28-11-2018



Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Delima, Kelurahan Tobek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu entah kemana Tergugat pergi;

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dengan alasan pergi keluar kota, dan Tergugat sudah sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Saksi melihat Tergugat pergi dari rumah;

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah pada tahun 2003;

Bahwa Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya dan tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak diketahui;

**Saksi II. Nama SAKSI II.**

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Delima, Kelurahan Tobek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu entah kemana Tergugat pergi;

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dengan alasan pergi keluar kota, dan Tergugat sudah sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Saksi melihat Tergugat pergi dari rumah;

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah pada tahun 2003;

Bahwa Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya dan tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak diketahui;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr;tgl 28-11-2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 7 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr;tgl 28-11-2018



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru pada tanggal 7 Desember 1997, atas nama sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 9 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr;tgl 28-11-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama SAKSI I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dengan alasan pergi keluar kota, dan Tergugat sudah sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui keberadaannya, atas pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama SAKSI II menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar, dan makian kepada Penggugat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sudah sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2003 dan tidak diketahui keberadaannya, atas pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I adalah keluarga Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI II adalah keluarga dekat Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar, cacian dan Penggugat pergi

Halaman 10 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr;tgl 28-11-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat sejak tahun 2003 dan tidak diketahui keberadaannya, atas pengetahuan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2003 dan tidak diketahui keberadaannya, atas pengetahuan saksi maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr;tgl 28-11-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 12 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr;tgl 28-11-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp336.000.00 (*tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Ali Amran, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Put.No.1075/Pdt.G/2018/PA.Pbr;tgl 28-11-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Barmawi, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2.	Biaya ATKRp	50.000.00
3.	Biaya panggilan	Rp 245.000.00
4.	Hak RedaksiRp	5.000.00
5.	MeteraiRp	<u>6.000.00</u>
Jumlah		Rp336.000.00

(tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)